

POLICY BRIEF

Pengembangan Profesional Guru SD dan SMP Kota Makassar Menuju Sistem Pengembangan Guru yang Berjenjang, Terdiferensiasi, dan Berbasis Bukti



BRIDA

BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

KOTA MAKASSAR



NOBEL INSTITUT

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si (Ketua)
2. Dr. Fitriani Latief, SP., M.M (Anggota)
3. Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M (Anggota)
4. Dr. Asri, S.Pd., M.Pd (Anggota)
5. Dr. H. Basri Rakhman, S.Sos., M.Si (Anggota)

Ditujukan kepada: Pemerintah Kota Makassar

Basis bukti: Riset kolaboratif Pemerintah Kota Makassar dan Institut Teknologi dan Bisnis Nobel

Indonesia, 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Pengembangan profesional guru di Kota Makassar memerlukan pendekatan yang lebih terarah daripada pelatihan yang seragam untuk seluruh guru. Penelitian terhadap 161 guru SD dan SMP menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, literasi digital, efikasi diri, dan kebutuhan pengembangan profesional membentuk pola hubungan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kompetensi pedagogik memiliki hubungan paling kuat dengan efikasi diri ($\beta=0,624$; $p<0,001$), sedangkan efikasi diri berkaitan signifikan dengan kebutuhan pengembangan profesional ($\beta=0,384$; $p<0,001$). Literasi digital juga berkaitan secara langsung dengan kebutuhan pengembangan profesional ($\beta=0,190$; $p=0,011$). Jalur kompetensi pedagogik melalui efikasi diri menuju kebutuhan pengembangan profesional juga signifikan ($\beta=0,240$; $p=0,001$). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan profesional tidak cukup diarahkan pada penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perlu membangun keyakinan guru untuk menerapkan kemampuan tersebut dalam praktik.

Analisis antarkelompok menunjukkan bahwa struktur hubungan model relatif konsisten antara guru SD dan SMP. Namun, kesamaan struktur tidak berarti isi program harus sama. Karakteristik pekerjaan kedua jenjang berbeda sehingga pelatihan, pendampingan, dan indikator keberhasilannya perlu dibedakan.

Policy brief ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Makassar menerapkan Model Pengembangan Profesional Guru Berjenjang yang terdiri atas enam tahapan: identifikasi kondisi awal, pemetaan kebutuhan dan penjenjangan, program pengembangan profesional yang dibedakan untuk SD dan SMP, implementasi dan pendampingan, pengukuran hasil jangka pendek-menengah, serta evaluasi dampak dan perbaikan berkelanjutan. Model tersebut tidak menggantikan sistem

penjenjangan pendidik yang telah berjalan, tetapi digunakan untuk memperkuatnya dengan bukti empiris.

2. Masalah Kebijakan

Persoalan utama bukan sekadar kurangnya kegiatan pelatihan. Persoalannya adalah ketepatan sasaran dan kesinambungan pengembangan guru. Pelatihan yang sama untuk semua guru berisiko tidak sesuai dengan tingkat kemampuan, kebutuhan kelas, karakteristik jenjang, dan tahap perkembangan profesional masing-masing guru.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kebutuhan pengembangan profesional tidak dapat dijelaskan dengan asumsi sederhana bahwa guru yang kurang kompeten pasti lebih membutuhkan pelatihan. Kompetensi pedagogik tidak menunjukkan hubungan langsung yang signifikan dengan kebutuhan pengembangan profesional ($\beta=0,014$; $p=0,898$). Sebaliknya, kompetensi pedagogik berkaitan kuat dengan efikasi diri, dan efikasi diri selanjutnya berkaitan dengan orientasi pengembangan profesional. Artinya, guru yang semakin mampu justru dapat semakin menyadari kebutuhan untuk terus berkembang.

Konsekuensinya bagi kebijakan adalah:

Pemerintah Kota Makassar perlu bergeser dari pendekatan “pelatihan untuk semua” menuju “pengembangan sesuai kebutuhan dan jenjang perkembangan guru”.

3. Bukti Utama Penelitian

Tabel 1. Bukti Utama dan Makna Kebijakannya

Temuan empiris	Hasil	Makna kebijakan
Kompetensi pedagogik ↔ efikasi diri	$\beta=0,624$; $p<0,001$	Pengembangan pedagogik perlu disertai praktik yang membangun pengalaman keberhasilan guru
Literasi digital ↔ efikasi diri	$\beta=0,090$; $p=0,210$	Pelatihan aplikasi digital saja tidak cukup untuk meningkatkan keyakinan profesional
Kompetensi pedagogik ↔ KPP langsung	$\beta=0,014$; $p=0,898$	Kebutuhan pengembangan tidak boleh ditentukan hanya dari rendah/tingginya kompetensi

Temuan empiris	Hasil	Makna kebijakan
Literasi digital ↔ KPP	$\beta=0,190$; $p=0,011$	Literasi digital perlu menjadi jalur pengembangan berkelanjutan
Efikasi diri ↔ KPP	$\beta=0,384$; $p<0,001$	Guru perlu memperoleh coaching, praktik, refleksi, dan umpan balik
KP → ED → KPP	$\beta=0,240$; $p=0,001$	Efikasi diri merupakan jalur penting yang menghubungkan kapasitas pedagogik dengan pengembangan profesional
Perbedaan SD–SMP	Tidak signifikan	Kerangka dasar dapat sama, tetapi isi program perlu dibedakan

Sumber: hasil penelitian, 2026.

4. Opsi Kebijakan

Tabel 2. Opsi Kebijakan Pengembangan Profesional Guru

Opsi	Desain	Kelebihan	Keterbatasan
A. Melanjutkan pola umum	Pelatihan seragam berdasarkan agenda tahunan	Mudah dikelola	Kurang responsif terhadap kebutuhan individual dan jenjang
B. Diferensiasi SD–SMP saja	Program dibedakan menurut jenjang	Lebih kontekstual	Belum memperhitungkan tingkat perkembangan profesional guru
C. Model berjenjang dan terdiferensiasi	Pemetaan → penjenjangan → program SD/SMP → pendampingan → evaluasi	Paling sesuai dengan bukti penelitian; lebih terarah dan dapat dievaluasi	Membutuhkan sistem pemetaan, pendamping, dan monitoring
D. Program khusus wilayah kepulauan	Pemetaan dan intervensi khusus Sangkarrang	Sensitif terhadap konteks geografis	Membutuhkan data tambahan dan sumber daya khusus

Opsi C direkomendasikan sebagai kerangka utama, sedangkan Opsi D menjadi strategi khusus untuk Kepulauan Sangkarrang.

5. Rekomendasi Kebijakan Utama

1) Terapkan pemetaan kebutuhan guru tahunan berbasis jenjang

Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan pemetaan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun terhadap kompetensi pedagogik, literasi digital, efikasi diri, kebutuhan pengembangan profesional, hasil supervisi, dan kebutuhan kelas.

2) **Integrasikan hasil pemetaan ke dalam sistem penjenjangan pendidik**

Guru tidak sebaiknya mengikuti program berdasarkan ketersediaan pelatihan semata. Jenis program perlu ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan posisi perkembangan profesional guru.

3) **Bedakan substansi pengembangan guru SD dan SMP**

- a. Untuk guru SD, prioritas diarahkan pada pengelolaan kelas holistik, pembelajaran berdiferensiasi, literasi-numerasi, asesmen formatif, dan integrasi teknologi lintas mata pelajaran.
- b. Untuk guru SMP, prioritas diarahkan pada pedagogi berbasis mata pelajaran, penguasaan konsep, asesmen bidang studi, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan teknologi sesuai disiplin ilmu. Diferensiasi tersebut sudah menjadi bagian dari rekomendasi hasil penelitian.

4) **Ubah pelatihan menjadi rangkaian belajar–praktik–pendampingan**

Setiap program utama idealnya terdiri atas: **pelatihan berbasis masalah → microteaching → praktik kelas → coaching 4–6 minggu → refleksi → evaluasi.**

Dengan demikian, keberhasilan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi pada perubahan praktik guru.

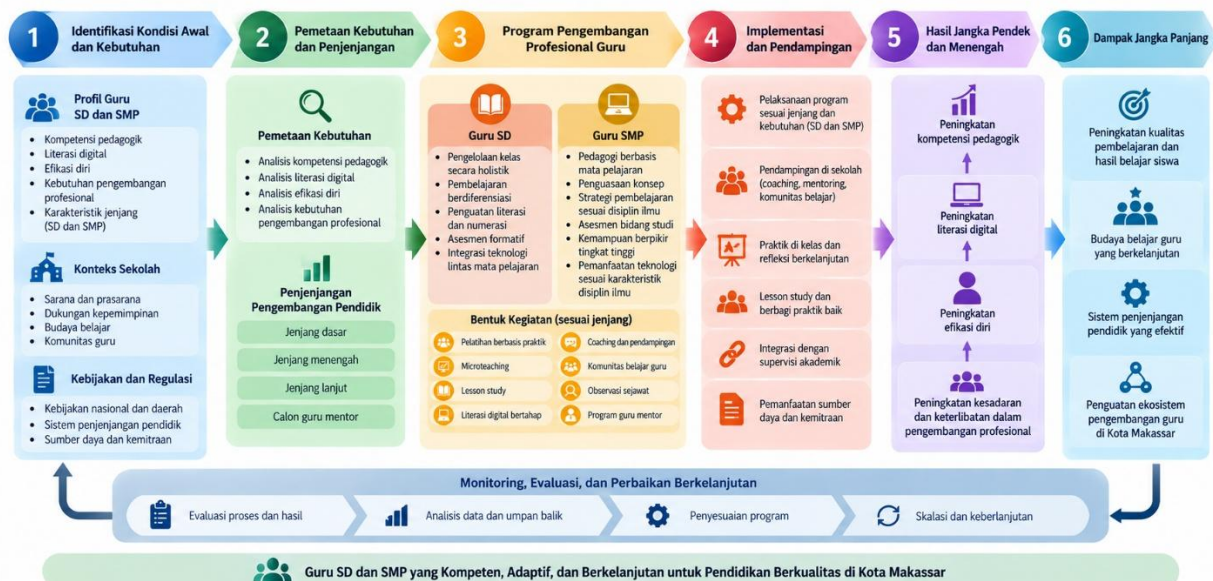
5) **Bangun sistem guru mentor dan komunitas belajar**

Guru yang telah mencapai tingkat pengembangan lebih tinggi diarahkan menjadi mentor. Komunitas belajar SD dapat fokus pada literasi, numerasi, diferensiasi, dan pengelolaan kelas; komunitas SMP dapat berbasis mata pelajaran atau rumpun bidang studi. Rekomendasi penelitian memang menempatkan mentoring dan komunitas profesional sebagai komponen implementasi utama.

6) Lakukan pemetaan khusus Kepulauan Sangkarrang sebelum penerapan penuh

Karena data penelitian tidak mencakup Kepulauan Sangkarrang, model tidak sebaiknya digeneralisasikan secara otomatis pada wilayah tersebut. Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan pemetaan khusus mengenai kebutuhan pedagogik, literasi digital, akses teknologi, kondisi sekolah, serta akses guru terhadap kegiatan pengembangan profesional sebelum menentukan bentuk program.

6. Model Implementasi yang Direkomendasikan



Gambar 1. Model Pengembangan Profesional Guru SD dan SMP Kota Makassar

Gambar 1 menunjukkan model pengembangan profesional guru SD dan SMP Kota Makassar yang dirancang sebagai proses berjenjang, terdiferensiasi, dan berkelanjutan. Model dimulai dari identifikasi kondisi awal dan kebutuhan guru dengan memperhatikan kompetensi pedagogik, literasi digital, efikasi diri, kebutuhan pengembangan profesional, karakteristik jenjang pendidikan, serta konteks sekolah. Informasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan menempatkan guru pada jenjang pengembangan yang sesuai.

Tahap berikutnya adalah penyusunan program pengembangan profesional yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk guru SD dan SMP, tetapi dengan isi yang dibedakan menurut karakteristik masing-masing jenjang. Pada jenjang SD, program diarahkan pada pengelolaan kelas secara holistik, pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasi dan numerasi, asesmen formatif, serta integrasi teknologi lintas mata pelajaran. Pada jenjang SMP, program lebih diarahkan pada pedagogi berbasis mata pelajaran, penguasaan konsep, asesmen bidang studi, pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta pemanfaatan teknologi sesuai karakteristik disiplin ilmu.

Implementasi program tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan di sekolah melalui coaching, mentoring, komunitas belajar, microteaching, lesson study, observasi sejawat, serta praktik dan refleksi pembelajaran. Pendekatan ini dimaksudkan agar program pengembangan profesional menghasilkan perubahan yang dapat diamati pada praktik guru, bukan hanya peningkatan partisipasi dalam pelatihan.

Pada tahap hasil jangka pendek dan menengah, model diarahkan pada peningkatan kompetensi pedagogik, literasi digital, efikasi diri, serta kesadaran dan keterlibatan guru dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Dalam jangka panjang, model diharapkan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, terbentuknya budaya belajar guru yang berkelanjutan, berfungsinya sistem penjenjangan pendidik secara lebih efektif, serta menguatnya ekosistem pengembangan guru di Kota Makassar.

Seluruh tahapan ditempatkan dalam siklus monitoring, evaluasi, analisis data dan umpan balik, penyesuaian program, serta penguatan keberlanjutan. Dengan demikian, model ini tidak bersifat linear dan sekali selesai, tetapi merupakan siklus perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi

pada satu periode digunakan kembali untuk memperbarui pemetaan kebutuhan dan menyesuaikan program pada periode berikutnya.

7. Rencana Implementasi

Tabel 3. Peta Implementasi Kebijakan

No.	Tahap	Kegiatan utama	Waktu	Produk
1.	Pemetaan	Asesmen pedagogik, digital, efikasi diri, kebutuhan guru	Awal tahun	Profil kebutuhan guru
2.	Penjenjangan	Mengelompokkan kebutuhan sesuai sistem yang berlaku	Setelah pemetaan	Peta jenjang pengembangan
3.	Program	Pelatihan berbeda SD–SMP	Semester I–II	Paket program
4.	Pendampingan	Coaching 4–6 minggu, lesson study, komunitas belajar	Setelah pelatihan	Bukti praktik
5.	Evaluasi	Pre–post–follow up dan observasi praktik	Setiap program	Laporan perubahan
6.	Perbaikan	Analisis hasil dan penyesuaian program	Tahunan	Program tahun berikutnya

8. Indikator Keberhasilan

Tabel 4. Indikator Monitoring dan Evaluasi

Level	Indikator
Input	Persentase guru yang telah dipetakan kebutuhannya
Proses	Persentase program sesuai jenjang dan kebutuhan
Output	Guru menyelesaikan microteaching, coaching, lesson study
Outcome guru	Perubahan kompetensi pedagogik, literasi digital, dan efikasi diri
Outcome praktik	Proporsi guru yang menerapkan strategi baru di kelas
Keberlanjutan	Guru aktif dalam komunitas belajar dan mentoring
Sistem	Hasil evaluasi digunakan untuk merancang program tahun berikutnya